



**PARLEMENTARIA**

## Tuntaskan Temuan BPK

**KETUA DPRD**  
Provinsi Kalimantan Barat, M Kebin L, mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait LHP APBD Tahun 2021 kepada Pemprov



**M. Kebin L**

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

### Sambungan dari halaman 1

Kalbar merupakan apresiasi bentuk akuntabilitas dan transparansi anggaran publik. Meski demikian, ada temuan sebanyak Rp3 miliar dari APBD Rp5 triliun lebih yang harus juga segera diselesaikan.

"Diperkirakan sekitar Rp3 miliar lebih saja sebagai temuan. Ada batas waktu selama 60 hari guna melakukan perbaikan. Saya optimis ini dapat diselesaikan cepat," katanya.

Politisi PDI Perjuangan Kalbar ini mengapresiasi pencapaian opini WTP Pemprov Kalbar. Sementara pada periode awal pemerintahan

Midji-Norsan (Sutarmidji-Ria Norsan), pemprov mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (setingkat di bawah WTP).

Menurut dia, banyak capaian melebihi target nasional yang berhasil diperoleh Midji-Norsan (Sutarmidji-Ria Norsan) dalam membangun Kalbar. Pemprov sendiri boleh dibilang berhasil menyelenggarakan pemerintahan sesuai harapan. Standar akuntansi nasional dalam pertanggungjawaban LHP sukses disampaikan.

Padahal, lanjutnya, sudah lebih dua tahun berturut-turut pandemi Covid-19 men-dera Kalbar. Namun pemerin-

tah daerah tahan banting dan fleksibel dalam mengelola anggaran publik. Di tengah Covid-19 juga, anggaran wajib seperti kesehatan, pendidikan termasuk infrastruktur terus dikawal untuk kepentingan masyarakat.

Kebin menambahkan dari segi indikator kedaerahan, boleh dikatakan Pemprov Kalbar memenuhi unsur maju sebagai sebuah provinsi. Pembangunan di tengah derasnya kritikan pemerataan dan terbatasnya anggaran berhasil diatasi. Hanya saja, tetap ada catatan yang disampaikan secara menyeluruh. "Temuan Rp3 miliar yang disampaikan BPK RI

harus dituntaskan juga. Apakah karena kurang bayar atau lebih. Atau lebih kepada administrasi harus juga diselesaikan. Ini supaya ke depan sama-sama tidak repot dipantau aparat hukum," ucapnya.

Sebelumnya perwakilan anggota BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan BPK RI tetap memberikan beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Kalbar pada APBD 2021. Meskipun angkanya tidak besar, berkisar Rp3 miliar tetap harus diselesaikan. Ada batas waktu selama 60 hari untuk perbaikan. *(den)*